



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025 KECAMATAN WONOCOLO



JL. JEMURSARI II/33-A
Kec.wonocolo@surabaya.go.id | (031)8417067



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

KECAMATAN WONOCOLO

Jl. Jemursari II/33-A Surabaya Surabaya 60237

Telp. (031) 8417067

KEPUTUSAN CAMAT WONOCOLO KOTA SURABAYA

Nomor : 000.7.2 / 409 /436.9.30./2023

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

CAMAT WONOCOLO KOTA SURABAYA

- Menimbang**
- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah RKPD ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan:
Pada pasal 125, persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 2 huruf a, meliputi:
 - a. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan Agenda kerja Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b diatas, Camat Wonocolo Kota Surabaya perlu menetapkan susunan keanggotaan tim penyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
- Mengingat**
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya tahun 2021-2026

3. Peraturan Walikota Surabaya nomor 102 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan kota Surabaya

Memperhatikan : Surat Sekretariat Daerah Kota Surabaya Nomor: 000.7.2/26577/436.8.1/2023 perihal Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT WONOCOLO KOTA SURABAYA TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN WONOCOLO KOTA SURABAYA TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat Wonocolo.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Wonocolo ;
- b. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Kecamatan Wonocolo ; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Camat Wonocolo.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 17 Nopember 2023

Camat,



Muslich Hariadi S.Sos, MM.
Pembina Tk I

NIP. 197204011992011001

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 000.7.2/409/436.9.30/2025
Tanggal : 17 Nopember 2023

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN WONOCOLO KOTA SURABAYA TAHUN 2025

No.	Keterangan Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Camat Wonocolo	Ketua
2.	Sekretaris Kecamatan Wonocolo	Sekretaris
3.	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Anggota
4.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian	Anggota
5.	Kepala Seksi Pembangunan	Anggota
6.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota
7.	Lurah Sidosermo	Anggota
8.	Lurah Bendul merisi	Anggota
9.	Lurah Margorejo	Anggota
10.	Lurah Jemurwonosari	Anggota
11.	Lurah Siwalankerto	Anggota
12.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
13.	Kepala Sub Keuangan	Anggota



Camat,

Muslich Hariadi S.Sos, MM.
Pembina Tk I
NIP. 197204011992011001

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Wonocolo Kata Surabaya Tahun 2025, dilakukan sesuai hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Wonocolo kata Surabaya Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja Anggaran Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Wonocolo Kata Surabaya Tahun 2025 yang selanjutnya adalah dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Wonocolo Kata Surabaya Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wonocolo Tahun 2025 merupakan penjabaran program/ kegiatan dan Sub Kegiatan dari Renstra Kecamatan Wonocolo Tahun 2021-2026 yang mengacu pada RPJMD Kata Surabaya Tahun 2021-2026, juga sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Namar 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.1 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wonocolo Tahun 2025 disusun dengan maksud :

1. Memperbaiki arah penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas, dan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sesuai tugas dan fungsi

Kecamatan sehingga didalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan dapat terfokus serta memaksimalkan pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya;

2. Memperbaiki rencana kerja satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kota Surabaya maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga pelaksanaan pelayanan publik, pembangunan, kemasyarakatan mendapatkan hasil yang kondusif dan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Tujuan:

1. Keselarasan tugas masing-masing unit pelaksana mewujudkan kegiatan.
2. Mewujudkan profesionalitas pegawai didalam merumuskan Terna dan Pokok tema Pemerintah Kota Surabaya.
3. Menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan Kota Surabaya Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Surabaya

1.2. Landasan Hukum

1.2.1 Keterkaitan Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

Berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan landasan hukum yang menjadi acuan adalah:

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Ssusunan Perangkat Daerah kota Surabaya.
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota.

1.2.2 Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja

Anggaran Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026;

9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota;
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2024;
12. Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 100.3.3.3/134/436.1.2/2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Wonocolo agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Triwulan II memuat kajian (review) hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun berkenaan Tabel 2.1.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Mengemukakan rincian Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Program dan Kegiatan Pada bagian ini dijelaskan mengenai :

1. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (mencakup lokasi, target, dan pagu indikatif) saat sebelum dan setelah mengalami perubahan
Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
2. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Wonocolo Tabel 3.1.

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN BERKENAN 2025

11.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Pelaksanaan Renja Kecamatan Wonocolo Tahun 2025 dilaksanakan dalam 5 (lima) program yang meliputi :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
- 4) Program Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
- 5) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Program - program tersebut diwujudkan dalam 10 (sepuluh) kegiatan yaitu :

- 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 2) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 3) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 4) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- 5) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- 6) Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat;
- 7) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan;
- 8) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
- 9) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 10) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;

Sedangkan Kegiatan-kegiatan tersebut didukung oleh 24 (dua puluh empat) sub kegiatan yaitu :

NO	NAMA SUB KEGIATAN	NO	NAMA SUB KEGIATAN
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.	Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintaha dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
5.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan
7.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	8.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

9.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jemurwonosari	10.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bendulmerisi
11.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margorejo	12.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidosermo
13.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Siwalankerto	14.	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jemurwonosari
15.	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bendulmerisi	16.	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Margorejo
17.	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidosermo	18.	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Siwalankerto
19.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	20.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
21.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	22.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
23.	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek , Sosialisasi, Konsultasi)	24.	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Wonocolo bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan Kecamatan Wonocolo dalam melaksanakan program dan kegiatannya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Hasil evaluasi Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Wonocolo Tahun 2025 sampai dengan triwulan II dijabarkan secara lengkap pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kec. Wonocolo sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
										K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13 = 6 + 12	14 = 13/5 x100%										
7		Unsur Kewilayahan																					
7.01		Kecamatan																					
7.01.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		19,646,719	23,539,567	24,582,493	4,928,871	-	-	-	4,928,871	4,928,871	25,09%										
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan [1361]	97.43 %	96.30 %	97.36 %	96.22 %	-	-	-	96.22 %	96.22 %	98.76%										
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		17,595,265		20,535,769	4,071,377	-	-	-	4,071,377	4,071,377	23.14%										
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN [1362]	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	100 %	100 %	100.00%										
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN [1496]		17,595,265		20,535,769	4,071,377	-	-	-	4,071,377	4,071,377	23.14%										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [5645]	75 Orang/bulan	60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	58 Orang/bulan	-	-	-	58 Orang/bulan	58 Orang/bulan	77.33%										
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		1,827,863		3,977,959	848,094	-	-	-	848,094	848,094	46.40%										
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan [1379]	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	100 %	100 %	100.00%										
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [2819]		1,827,863		3,977,959	848,094	-	-	-	848,094	848,094	46.40%										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [5648]	100 Paket	124 Paket	100 Paket	23 Paket	-	-	-	23 Paket	23 Paket	23.00%										
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		223,592		68,765	9,400	-	-	-	9,400	9,400	4.20%										
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan [1689]	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	100 %	100 %	100.00%										
7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [2806]		223,592		68,765	9,400	-	-	-	9,400	9,400	4.20%										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [5647]	100 Unit	78 Unit	100 Unit	15 Unit	-	-	-	15 Unit	15 Unit	15.00%										
7.01.02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		3,810,367	30,358	97,165	12,794	-	-	-	12,794	12,794	0.34%										
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah [1187]	100 %	99.41 %	100 %	100.00 %	-	-	-	100.00 %	100.00 %	100.00%										
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat [1099]	100 %	100.00 %	100 %	0.00 %	-	-	-	0.00 %	0.00 %	0.00%										
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan [1097]	37.94 %	57.50 %	35.14 %	87.50 %	-	-	-	87.50 %	87.50 %	230.63%										
7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		8,910		1,800	1,800	-	-	-	1,800	1,800	20.20%										
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat Kecamatan [1361]	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	-	-	-	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00%										
7.01.02.2.01.0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait [2791]		8,910		1,800	1,800	-	-	-	1,800	1,800	20.20%										
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait [5646]	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100.00%										
7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		3,684,744		90,219	10,994	-	-	-	10,994	10,994	0.30%										
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan [1644]	280 Lembaga	281 Lembaga	281 Lembaga	281 Lembaga	-	-	-	281 Lembaga	281 Lembaga	100.36%										
7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan [2902]		3,684,744		90,219	10,994	-	-	-	10,994	10,994	0.30%										
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan [5652]	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	-	-	-	3 Laporan	3 Laporan	25.00%										
7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		116,713		5,146	0	-	-	-	0	0	0.00%										
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat [2003]	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	-	-	-	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00%										
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perzinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat [1646]	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	-	-	-	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00%										
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat [2004]	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	-	-	-	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00%										
7.01.02.2.04.0003		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan [2878]		6,699		1,680	0	-	-	-	0	0	0.00%										

Perubahan Rencana kerja 2025
Kecamatan Wonocolo

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
										K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
7.01.02.2.04.0002																							
7.01.02.2.04.0001																							
7.01.03																							
7.01.03.2.02																							
7.01.03.2.02.0002																							
7.01.03.2.02.0002																							
7.01.03.2.02.0002																							
7.01.03.2.02.0002																							
7.01.03.2.02.0002																							
7.01.03.2.02.0003																							
7.01.03.2.02.0003																							
7.01.03.2.02.0003																							
7.01.03.2.02.0003																							
7.01.03.2.02.0003																							
7.01.03.2.02.0001																							
7.01.03.2.03																							

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
														K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)								
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
7.01.03.2.03.0004						Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat [3261]			3,350				32.378			0		-		-		-			0		0		0,00%
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat [5664]	48 Laporan			48 Laporan		48 Laporan		4 Laporan		-		-		-			4 Laporan		4 Laporan		8.33%	
7.01.03.2.03.0003						Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan [4643]			184,826				140.448			0		-		-		-			0		0		0,00%
							Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan [6821]	44 Unit			44 Unit		44 Unit		0 Unit		-		-		-			0 Unit		0 Unit		0.00%	
7.01.04						Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			165,173		128,000		121,104		22,377		-		-		-			22,377		22,377		13,55%	
							Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan [1399]	100 %			100.00 %		100 %		100.00 %		-		-		-			100.00 %		100.00 %		100.00%	
7.01.04.2.01						Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			165,173				121,104		22,377		-		-		-			22,377		22,377		13,55%	
							Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan diterbitkan [1706]	8 Lokasi			8 Lokasi		8 Lokasi		8 Lokasi		-		-		-			8 Lokasi		8 Lokasi		100.00%	
7.01.04.2.01.0001						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan [3262]			165,173				121.104		22.377		-		-		-			22.377		22.377		13,55%	
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan [5665]	360 Laporan			360 Laporan		360 Laporan		88 Laporan		-		-		-			88 Laporan		88 Laporan		24.44%	
7.01.05						Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			40,074		15,927		7,850		715		-		-		-			715		715		1,79%	
							Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan [1400]	100 %			100.00 %		100 %		100.00 %		-		-		-			100.00 %		100.00 %		100.00%	
7.01.05.2.01						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			40,074				7,850		715		-		-		-			715		715		1,79%	
							Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [1707]	88 Kasus			88 Kasus		88 Kasus		21 Kasus		-		-		-			21 Kasus		21 Kasus		23.86%	
							Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional [2005]	2 Topik			2 Topik		2 Topik		0 Topik		-		-		-			0 Topik		0 Topik		0.00%	
7.01.05.2.01.0002						Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional [3263]			23,766				3.500		0		-		-		-			0		0		0,00%	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional [5666]	58 Orang			35 Orang		39 Orang		0 Orang		-		-		-			0 Orang		0 Orang		0.00%	
7.01.05.2.01.0005						Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan [3264]			16,308				4.350		715		-		-		-			715		715		4,39%	
							Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan [5667]	88 Laporan			88 Laporan		24 Laporan		6 Laporan		-		-		-			6 Laporan		6 Laporan		6.82%	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dasar pertimbangan dalam penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya adalah Visi dan Misi Walikota Surabaya. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan harus sejalan dan dapat mendukung tercapainya visi dan misi tersebut. Untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan ada faktor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan dan peraturan-peraturan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya di dukung dari dana APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wonocolo Tahun 2025 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 yang pada umumnya dapat berupa perubahan output kegiatan maupun sub kegiatan, target capaian kinerja serta kebutuhan dana/pagu indikatif. Perubahan Renja Kecamatan Wonocolo Tahun 2025 dirumuskan dalam 5 (lima) program terdiri dari 1:)

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- 4) Program Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- 5) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Rencana Program, Kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Wonocolo pada Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 tidak mengalami perubahan output namun ada Penyesuaian Anggaran. Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Wonocolo Tahun 2025 melaksanakan 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan yang dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Kec. Wonocolo
Tahun 2025

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,36 %	24,582,493,477	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,36 %	25,059,980,310	
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	20,535,769,044	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	20,298,470,754	
	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Wonocolo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	20,535,769,044	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Wonocolo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	20,298,470,754	
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	3,977,959,435	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	4,652,790,599	
	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Wonocolo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	3,977,959,435	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Wonocolo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	4,652,790,599	
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	68,764,998	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	108,718,957	
	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Wonocolo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	68,764,998	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Wonocolo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	108,718,957	
2	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	97,165,160	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	96,448,136	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %		
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	35.14 %				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	35.14 %		
	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat Kecamatan	6 Lembaga	1,800,000	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat Kecamatan	6 Lembaga	1,800,000	
	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Wonocolo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1,800,000	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Wonocolo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1,800,000	
	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	281 Lembaga	90,219,200	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	281 Lembaga	90,219,200	
	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Wonocolo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	90,219,200	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Wonocolo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	90,219,200	
	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	5,145,960	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	4,428,936	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		
	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Wonocolo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	1,500,000	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Wonocolo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	1,500,000	
	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Wonocolo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	1,965,960	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Wonocolo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	1,965,960	
	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Wonocolo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	1,680,000	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Wonocolo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	962,976	
3	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	15,802,647,351	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	15,815,438,151	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %		
	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	15,629,821,751	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	15,629,821,751	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan		
	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Wonocolo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	7,500,000	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Wonocolo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	7,500,000	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Siwalankerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	2,923,787,557	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Siwalankerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	2,923,787,557	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sidosermo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1,406,816,428	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sidosermo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1,684,781,004	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bendul Merisi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	3,507,962,480	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bendul Merisi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	3,507,962,480	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Jemur Wonosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,567,901,151	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Jemur Wonosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,567,901,151	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Margorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1,131,897,530	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Margorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1,131,897,530	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Siwalankerto	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	879,733,782	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Siwalankerto	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	879,733,782	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jemur Wonosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	949,200,000	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jemur Wonosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	949,200,000	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bendul Merisi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,310,740,125	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bendul Merisi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,310,740,125	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Margorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,070,128,122	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Margorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,070,128,122	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sidosermo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	874,154,576	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sidosermo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	596,190,000	
	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga	172,825,600	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga	185,616,400	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	156 Lembaga				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	156 Lembaga		

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Wonocolo	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	44 Unit	140,448,000	7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Wonocolo	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	44 Unit	153,238,800	
	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Wonocolo	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	32,377,600	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Wonocolo	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	32,377,600	
4	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	121,104,000	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	132,292,804	
	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi	121,104,000	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi	132,292,804	
	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Wonocolo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan	121,104,000	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Wonocolo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan	132,292,804	
5	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	7,850,000	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	7,850,000	
	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	88 Kasus	7,850,000	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	88 Kasus	7,850,000	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		
	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Wonocolo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	39 Orang	3,500,000	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Wonocolo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	39 Orang	3,500,000	
	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Kec. Wonocolo	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	24 Laporan	4,350,000	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Kec. Wonocolo	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	24 Laporan	4,350,000	

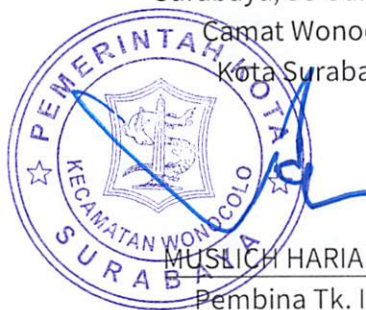
BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Wonocolo Tahun 2025 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Kecamatan Wonocolo pada tahun 2025 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.

Perubahan Renja Kecamatan Wonocolo Tahun 2025 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya.

Surabaya, 30 Juni 2025

Camat Wonocolo
Kota Surabaya



MUSLICH HARIADI S.Sos
Pembina Tk. I / IV b
197204011992011001